

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **1.1.1 Kemiskinan**

###### **1.1.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Menurut World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Disisi lain, kemiskinan itu sendiri dapat di definisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappena, 2020). Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu: (1) aspek primer, yaitu berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan dan (2) aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi (Asyad,2010:299).

Menurut para ahli (antara lain andre bayo ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-mensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air,perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Asyad,2004:237).

Menurut Ravallion (2001), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghalangi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Asyad, 2010:300) .

Menurut Nurkse kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa mendatang. Sehubungan dengan hal itu lahirlah suatu ungkapan Nurkse yang terkenal adalah “ *a country is poor because it is poor*”. Salah satu faktor yang diidentifikasi Nurkse sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal.

Menurut Nurkse, ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi di NSB untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu: (1) dari segi penawaran modal, dan (2) dari segi permintaan modal.

Dari sisi penawaran modal, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktifitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. tingkat pembentukan modal yang rendah akan menyebablan suatu negara menghadapi kekurangan barang-barang modal, dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap berada pada tingkata yang rendah.

Dari sisi permintaan modal, corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda. Di NSB, faktor pendorong untuk kegiatan investasi relatif rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barangnya terbatas. Terbatasnya pasar disebabkan oleh pendapatan masyarakatnya rendah, dan produktivitas yang rendah seringkali disebabkan oleh terbatasnya pembentukan modal di masa lampau. Pembentukan modal yang relatif terbatas ini disebabkan oleh adanya kekurangan pada faktor pendorong kegiatan investasi.

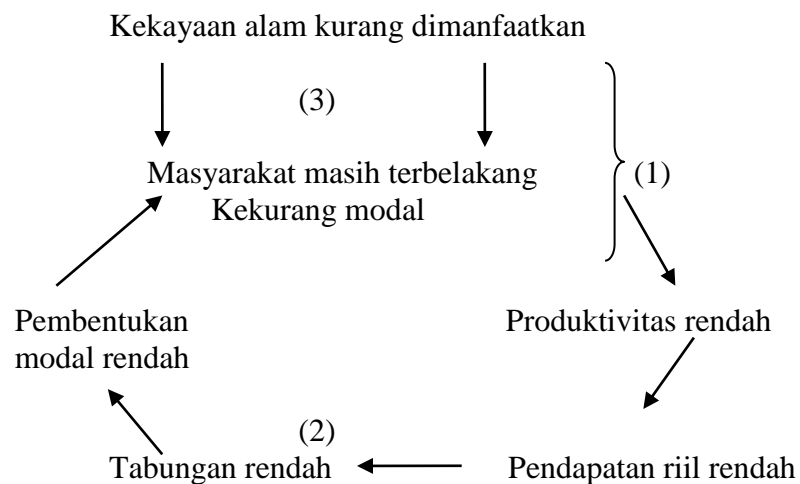
Pada bagian lain dari analisisnya, Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan hanya dibatasi oleh lingkaran kemiskinan, tetapi juga oleh adanya efek pamer internasional (*international demonstration effect*). Efek pamer internasional ini dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk meniru pola konsumsi masyarakat yang lebih maju.

Adanya tambahan pengeluaran untuk membeli dan mengkonsumsi produk asing tersebut akan mengurangi tingkat tabungan yang akan dihimpun oleh NSB untuk membiayai pembentukan modal mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efek pamer internasional tersebut akan memperburuk dampak lingkaran kemiskinan yang dihadapi oleh NSB (Arsyad, 2010: 112).

Meier & Baldwin (1957) mencoba mengemukakan satu konsep lingkaran kemiskinan yang agak berbeda. Lingkaran kemiskinan ini timbul dari hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat yang masih terbelakang (tradisional) dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan

berbagai macam kegiatan ekonomi. Di negara sedang berkembang kekayaan alam belumlah sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tiga alasan yaitu: (1) tingkat pendidikan masyarakatnya masih sangat rendah, (2) kurangnya tenaga ahli yang diperlukan, (3) terbatasnya mobilitas dari sumberdaya yang ada (Arsyad, 2010: 112).

Kenyataan berbagai negara menunjukkan bahwa semakin kurang berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi suatu negara, semakin terbatas pula jumlah sumberdaya dan kekayaan alam yang sudah dimanfaatkan dengan penuh. ketiga lingkaran kemiskinan tersebut dapat dilukiskan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 2.1  
Lingkaran Kemiskinan

Sebagai kesimpulan, pada hakikatnya konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal, dan (3) tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat rendah, merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai NSB (Arsyad, 2010: 113).

### **1.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan**

Pengaruh kemiskinan dengan beberapa aspek ekonomi terdiri dari tiga komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), upah minimum, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan dan bukan hanya itu saja upah minimum kabupaten/kota juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Ahmad, 2013:18).

### **1.1.1.3 Macam-Macam Ukuran Kemiskinan**

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif:

#### 1) Kemiskinan *absolut*

Konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah perkiraan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seorang untuk dapat hidup secara layak. Tingkat pendapatan yang minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini juga sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro dan Smith 2003) dalam buku (Asyad, :301).

## 2) Kemiskinan *Relatif*

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut “tidak miskin”. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinann lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep ini yang kemudian kita kenal sebagai konsep kemiskinan relatif, bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada oleh karena itu, Kincaid (1975) memandang kemiskinan dari aspek ketimpang sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

### **1.1.1.4 Indikator Kemiskinan**

indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras perkapita per tahun, tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan rakyat.

#### 1) Indikator konsumsi beras

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita tahun bisa di golongan miskin sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

Secara lebih terinci sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 kelompok.

**Tabel 2.1**  
**Indikator konsumsi beras**

	Perdesaan	Perkotaan
Melarat	180 kg	270 kg
Sangat miskin	240 kg	360 kg
Miskin	320 kg	480 kg

Namun sejak tahun 1979 garis meralat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis nyaris miskin, yaitu dengan 480 kg dan 720 kg di perkotaan (sajogyo, dalam bps 1986).

1) Indikator tingkat pendapatan

Menurut BPS ( 1989) di daerah perkotaan pendapatan yang dibutuhkan untuk melepaskan dari dari kategori miskin adalah Rp 4.522.00; perkapita pada tahun 1979, sedangkan pada tahun 1993 adalah Rp. 27.905.00.

Di daerah perdesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yakni sekitar Rp.2.849,00; pada tahun 1976 dari Rp. 18.244 pada tahun 1993.

2) Indikator kesejahteraan rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang berjudul international definition and measurement of levels: An interim guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan.

### 3) Indeks kemiskinan manusia

Indeks ini diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) dalam salah satu laporan tahunannya, *human development report*(1997). Indeks ini terlahir karena ketidakpuasan UNDP dengan indikator pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh bank dunia sebagai tolak ukur kemiskinan di suatu wilayah (negara). Dengan ini UNDP mengganti ukuran kemiskinan dari segi pendapatn (Bank Dunia) dengan ukuran dari segi kualitas hidup manusia. Argumen umum yang digunakan oleh UNDP adalah bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah, jadi bukan berapa banyak pendapatan perkapita yang mampu mereka raih tapi harinya.

Sebenarnya, Indek Kemiskinan Manusia ini banyak memiliki kemiripan dengan indek pembangunan manusia (*Humas Development Index*), yang telah dibahas pada model sebelumnya. Menurut UNDP, ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu:

1. Tingkat Kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang bergitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
2. Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangkan hak pendidikan pada kaum wanita.



3. Tingkat pendidikan ekonomi, diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

Oleh karena itu, nilai indek kemiskinan manusia merepresentasikan proposi jumlah penduduk di suatu wilayah yang “kehilangan” tiga nilai pokok tersebut. Angka indeks kemiskinan manusia yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pula (presentase penduduk yang kehilangan hak atas tiga nilai utama tersebut relatif kecil), bergitu juga sebaliknya.

#### **1.1.1.5 Strategi/Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan**

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia.

Di Indonesia, atau mungkin di mana saja, pendidikan (baik formal maupun nonformal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Intervensi pemerintah di bidang kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor

utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung dapat memuaskan kebutuhan atas konsumsi barang-barang pokok yang juga merupakan tujuan kebijakan sosial yang sangat penting. Kedua, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan meningkatkan output energi. Ketiga, penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tidak langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan yaitu menurunkan tingkat kesuburan, tingkat kematian yang semakin rendah tidak saja membantu para orangtua untuk mencapai jumlah keluarga yang diinginkan, namun juga membuat mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

Pelayanan-pelayanan pokok, seperti listrik dan air bersih, perumahan yang layak sarana kesehatan yang baik, dan lain sebagainya juga cukup penting bagi golongan miskin. Tanpa adanya perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan-pelayanan pokok tersebut, maka efektivitas dari setiap pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan di atas dapat terganggu.

#### 1. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan

Sektor pertanian berperan penting dalam ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah perdesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan perdesaan dan pengurangan kemiskinan perdesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi.

## 2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM-LSM dapat memainkan peran yang lebih besar di dalam perencanaan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM ini untuk beberapa hal mereka mampu menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif dari pada program-program pemerintah. Keterlibatan LSM-LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat-karya untuk mengurangi kemiskinan.

Bentuk dan macam organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti bisa di kelompokkan ke dalam 4 kategori:

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 2) Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM)
- 3) Organisasi-organisasi sosial lainnya, dan
- 4) Organisasi-organisasi Semi-pemerintahan

### **1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah. Perkembangan PDRB atas harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam menganalisis ketimpangan wilayah dapat dihitung menggunakan data PDRB kabupaten dan

kota, apabila dilakukan maka akan di peroleh indeks ketimpangan wilayah antar kabupaten dan kota dalam suatu provinsi (Sjafrizal, 2014 :195).

Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (a) pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan stok, dan (e) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di wilayah tersebut. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.

Produk Domesti Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah Bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di

wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antar nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan) penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan PDRB atas dasar harga pasar (Taringan,2015:18).

### **1.1.3 PDRB Perkapita**

Pendapatan Perkapita (PDRB perkapita) merupakan hasil bagi antara Pendapatan Regional (Nilai PDRB) dengan jumlah penduduk (pertengahan tahun). Saat ini indikator Ekonomi Makro yang mrnyajikan perolehan Pendapatan wilayah, baru terbatas pada PDRB. PDRB merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian PDRB Perkapita merupakan pendekatan yang masih valid terhadap Pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita ini menunjukkan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendapatan yang dimaksud dalam PDRB menganut kepada konsep "*Product Originated*" yaitu merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut (BPS, 2018 : 36).

## **1.1.4 Ketimpangan Pembangunan**

### **1.1.4.1 Pengertian Ketimpangan**

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda, karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah relatif maju (*Developed Region*) dan wilayah relatif terbelakang (*Underdeveloped Region*).

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasaan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggung melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2012:107).

### **1.1.4.2 Teori Hipotesis Neo-klasik**

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan

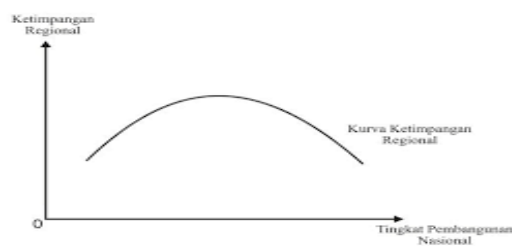
pembangunan antar wilayah. Hipotesis ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik.

Menurut Hipotesis Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesis Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012:108-109).

Simon Kuznet (1955)dalam Todaro (2006)mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun

pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern (Arsyad,2012: 292). Adapun model dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik.



**Gambar 2.2**  
**kurva Kuznet “U-Terbalik**

Sesuai dengan kesimpulan ini, hipotesis yang dapat di tarik untuk kegiatan penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan jumlah dan tenaga kerja suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Kedua, pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan, maka ketimpangan pembangunan antardaerah akan berkurang dengan sendirinya (Sjafrizal, 2012:101).

#### **1.1.4.3 Ukuran ketimpangan pembangunan**

Ukuran ketimpangan pembangunan antarwilayah yang mula-mula dilakukan adalah *Williamson Indeks* yang digunakan dalam studi Jeffrey G. *Williamson* pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah



*coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur perbedaan. Istilah *Williamson Indeks* muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun *Indeks* ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definsi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, Namundemikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012).

Berbeda dengan gini rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, williamson index menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita sebagai dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar kelompok. Dengan demikian, Formulasi Indeks Williamson yang digunakan yaitu:

$$V_W = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}{y}} \quad 0 < V_W < 1 \dots\dots\dots(2.1)$$

$V_W$  = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita daerahi

$y$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

$f_i$  =Jumlah penduduk daerah  $i$

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Subskrip w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian ini adalah sebagai berikut: bila  $V_w$  mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila  $v_w$  mendekati nol berarti sangat

merata (Sjafrizal, 2008:108). Ukuran ketimpangan antar wilayah indeks williamson berkisaran antara 0-1.

- a) Bila Indeks Williamson  $< 0.3$  artinya ketimpangan wilayah rendah
- b) Bila Indeks Williamson  $0.3 - 0.5$  artinya ketimpangan wilayah sedang
- c) Bila Indeks Williamson  $> 0.5$  artinya ketimpangan tinggi

#### **1.1.4.4 Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah**

Selanjutnya, pada bagian ini, perlu pula dibahas beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Dengan adanya analisa ini, akan dapat dijelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Disamping itu, analisa ini juga sangat penting artinya karena hasilnya apat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut.

##### a) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang

juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah (Sjafrizal,2008:117).

b) Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2008:118).

c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan

cenderung tinggi pada negara sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar dan masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir.

d) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat (Sjafizal, 2008:119).

e) Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Tidak dapat disangka bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah (Sjafizal, 2008:120).

#### **1.1.4.5 Solusi Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah**

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah (Sjafrizal, 2008:121).

##### **1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan**

Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut. Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah. Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruh pelosok daerah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan disini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah (Sjafrizal, 2008:121-122).

## 2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Untuk mengurangi kepentingan pembangun antar wilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan akan dapat pula digerakan (Sjafrizal, 2008;122-123).

## 3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan (Growth Poles) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan

pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah (Sjafrizal, 2008:123-124).

#### 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas, karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar daerah akan dapat pula dikurangi. Pemerintah indonesia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan mulai tahun 2001 yang lalu. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerahnya masing-masing (desentralisasi pembangunan)(Sjafrizal,2008:124-125).

##### **1.1.5 Hubungan Ketimpangan Pembangunan dan Tingkat Kemiskinan**

Miller (Arsyad, 2006) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh

keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan layaknya satu unsur yang tak dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan karena adanya ketimpangan social dalam suatu wilayah. Dimana sebagian besar pendapatan suatu negara hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang dan lainnya hanya mendapatkan porsi yang kecil atau malah tidak mendapatkannya. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan memiliki pengaruh yang negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka akan meningkatkan pula disparitas ekonomi yang akan terjadi. Ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama di daerah berkembang, karena ketimpangan pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasikan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Datt dan Ravvalin (1990) menekankan bahwa salah satu pengetasan kemiskinan disuatu daerah adalah dengan menghilangkan ketimpangan antarwilayah yang terjadi, karena ketimpangan tersebutlah yang pada akhirnya mendorong terciptanya kemiskinan.



## 1.2 Penelitian Sebelumnya

Mopangga (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo” Analisis yang digunakan adalah *Indeks Williamson, Gini Ratio, Shift-Share, Klassen Typhology dan Regression of Unbalanced Panel*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan non pertanian tetapi pertanian masih dominan dalam struktur perekonomian.

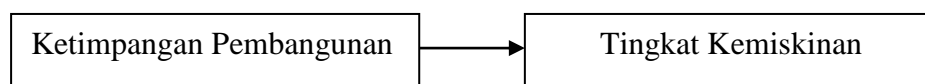
Ginting (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antara Wilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013” Alat analisis yang digunakan indeks williamson dan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai 2013 tingkat kemiskinan di indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan di tunjukana dengan indeks willamson yang semakin menurun untuk indonesia bagian barat dan timur.

Puti Andiny dan Pipit Mandasari (2017) melakukan penelitian tentang “Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan dan ketimpangan pembangunan Provinsi Aceh tahun 2006-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh, dengan nilai thitung < ttabel untuk variabel X1 (pertumbuhan ekonomi) adalah  $0,077 < 0,723$ .

Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai  $t_{hitung} > -t_{tabel}$  untuk variabel  $X_2$  Kemiskinan adalah  $-0,107 > -0,829$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel  $X_2$  (kemiskinan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  adalah  $0,073 < 0,930$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima, yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai  $R^2$  sebesar 0,020 atau 2,0 persen. Hasil ini menunjukkan variabel Ketimpangan dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan sebesar 2,0 persen, selebihnya Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 98 persen yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini memiliki 2 variabel penelitian yaitu ketimpangan pembangunan sebagai variabel bebas dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2020. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3  
Kerangka pemikiran

#### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori dan masalah sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa ketimpangan pembangunan (X) berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan (Y) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2020.